**IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT
(PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEMBILAHAN)**

Oleh: Bella Bastara Nurrahma

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Zainul Akmal, SH., MH

Alamat: Jl. Mutiara 1 No. 3, Indragiri Hilir

Email / Telepon : bella.bastara@gmail.com / 0822-8634-8528

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are a common phenomenon in major cities in Indonesia. The case of street vendors is considered by many to be a form of government failure to provide employment for the poor. Tembilahan District is one of the cities that is also inhabited by street vendors.

This research was conducted using a qualitative approach, the author went to the field to conduct direct observations and interviews with research informants. The existence of street vendors in Tembilahan City has caused many problems, including making the city unruly, dirty and causing congestion. During this time, the Satpol PP apparatus has taken action.

The enforcement activities carried out by the enforcement officers are usually in the form of eviction of the street vendors. It is not uncommon for the officers to evict and confiscate the selling places of street vendors who are still stubborn and do not listen to the officers. However, the control of street vendors in Tembialahn Subdistrict has not been carried out optimally. This is caused by several factors, such as: (1) There is no strict punishment for street vendors who continue to sell on the side of the road even though they have been repeatedly warned by officers. The punishment given so far has only been administrative or administrative. eviction and confiscation of street vendors' goods temporarily. (2) The Tembilahan City Government has not been consistent and unified in addressing the existence of street vendors in Tembilahan District.

The conclusion of the research is that the control of street vendors by the Tembilahan City Pamong Praja Police Unit has gone well in accordance with the theory put forward by Van Meter and Van Horn, but there are several obstacles in the control of these street vendors.

Suggestions from this research are first that the Tembilahan City Pamong Praja Police Unit should increase resources in carrying out the control of street vendors, secondly provide socialization to the community and thirdly impose sanctions on people who violate.

Keywords : Policy Implementation and Control, Street Vendors, Satpol PP

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.¹ Pedagang kaki lima yaitu kegiatan usaha dagang yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bentuk elemen evolutif yang mempengaruhi suatu kota karena sifatnya yang cenderung berubah-ubah. Sedangkan menurut perspektif permanensi, terkadang Pedagang Kaki Lima yang notabene merupakan bagian dari sektor informal ini dapat berperan sebagai elemen propelling sekaligus sebagai elemen patologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima memiliki peran yang cukup besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia khususnya di Kecamatan Tembilihan. Selain menyediakan barang-barang kebutuhan bagi masyarakat menengah ke bawah, Sedangkan dari sisi tata ruang, keberadaan Pedagang Kaki Lima ini dapat menjadi generator kawasan wisata baru pada kawasan tersebut.²

Pedagang Kaki Lima orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang kebutuhan harian untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi Pedagang Kaki Lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang,

yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima berdagang ditempat yang ramai seperti trotoar dan ruang terbuka.³

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir, Riau menertibkan para Pedagang Kaki Lima dan tempat usaha yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Salah satu tempat penertiban dilakukan oleh personil Satpol PP dengan menyusuri sekitaran Jalan Sudirman. Petugas memberikan teguran tertulis kepada Pedagang Kaki Lima yang atap bangunan dan plang nama tokonya melewati trotoar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.⁴

Berdasarkan ruang lingkup Peraturan Daerah diatas, maka aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sudah barang tentu melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat bahwa:⁵

Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang berjualan di jalan, jembatan, trotoar, turap, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya.

(2) Bupati dapat menetapkan bagian jalan dan tempat umum lainnya dan tempat usaha dan/atau pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.

(3) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus tanggung jawab terhadap ketertiban,

¹ Gasper Liauw, "Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL", Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm.30.

² Gusti Pratama Putra "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir", Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 2.

³ Ibid, hlm. 3.

⁴ <https://www.goriau.com/berita/baca/tertibkan-pkl-mangkal-satpol-pp>, diakses, tanggal, 25 februari 2023.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barang dagangannya akan dilakukan penertiban.

(5) Bagian jalan dan tempat kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Sebagaimana telah diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut:⁶

Pasal 148

1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Bunyi Pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Sepanjang masih terlihat terjadinya pelanggaran, Satpol PP akan coba menghimbau, mensosialisasikan, melakukan teguran terhadap Pedagang Kaki Lima.⁷

Kasus pedagang kaki lima ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Salah satu faktor yang terkait dengan problema riil pedagang kaki lima adalah konsep informalitas diperkotaan.⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa sangat perlu ada penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tembilahan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implemmentasi penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan berdasarkan peraturan daerah Indragiri Hilir No11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implemmentasi penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) berdasarkan peraturan daerah Indragiri Hilir No11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat di kecamatan Tembilahan Riau.

⁶ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁷<https://riaulink.com/news/detail/17883/ganggu-pejalan-kaki-satpol-pp-tertibkan-pkl-di-wilayah-tembilahan>, diakses, tanggal, 25 februari 2023.

⁸<https://repository.uir.ac.id/3666/4/bab1.pdf>, diakses, tanggal, 25 februari 2023.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan

2) Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.

b. Berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari koordinasi hubungan antara lembaga, pengawasan, serta pendindakan selama ini oleh aparatur pemerintahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.⁹

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁰ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-

kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”¹¹

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan yang dijabarkan oleh Robert J. M. Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Jelasnya pengawasan itu harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:¹³

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai makna pengawasan bahwa pengawasan itu merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda

¹¹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat”, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20.

¹² Hani Handoko, “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia”, Rafika Aditam, Jakarta, 1999, hlm. 360.

¹³ Maragin Masry Simbolon, “Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.

⁹ Sarwoto, “Dasar-dasar Organisasi dan Management”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 93.

¹⁰ M. Manullang, “Dasar-dasar Management”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 136.

rechtshandhaving. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵
2. Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶
3. Pengawasan yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan atau pengimplementasian kegiatan apakah sudah sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁷
4. Penindakan adalah memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.¹⁸
5. Ketertiban Umum adalah suatu tatanan atau keadaan yang diatur sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.¹⁹

6. Penyakit Masyarakat atau penyakit sosial adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat atau melanggar norma-norma umum.²⁰
7. Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.²¹
8. Pedagang Kaki Lima adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, yang berorientasi pada laba (profit) layaknya kewirausahaan.²²
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.²³
10. Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² atau 19,737 Ha.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian penelitian yuridis

¹⁹[http://satpolpp.inhilkab.go.id/wpcontent/uploads/2021/03/PERDA-11-TAHUN 2016.pdf](http://satpolpp.inhilkab.go.id/wpcontent/uploads/2021/03/PERDA-11-TAHUN%202016.pdf), diakses, tanggal, 8 Agustus 2023.

²⁰<http://ejournal.uajy.ac.id/698/2/1HK08919.pdf>, diakses, tanggal, 8 Agustus 2023.

²¹ Ifan Wardani Harsan, "Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 146.

²² Nurrafiqah Sari, "Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2020, hlm. 35.

²³<https://riaulink.com/news/detail/18158/bupati-inhil-intruksikan-satpolpp-tegakan-perda-no-11-tahun-2016-tentang-ketertiban-umum>, diakses, tanggal, 25 Januari 2023.

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/tembilahan,_indragiri_hilir diakses, tanggal, 26 Januari 2023.

¹⁴ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

¹⁵ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, Hlm. 45.

¹⁶<https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/6616/3/BAB%20II.Pdf>, diakses, tanggal, 8 Agustus 2023.

¹⁷ Riska Saiful, "Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Bupati Kabupaten Enrekang", *Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020, hlm. 10.

¹⁸<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>, diakses, tanggal, 8 Agustus 2023.

sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kecamatan Tembilahan Yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer** adalah bahan – bahan hukum yang bersumber dari undang – undang dan terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Indargiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pembinaan, pengawasan, dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.
- 3) **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum) dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

dengan wawancara, kajian kepustakaan serta observasi.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori “Pengawasan” dan teori “Penegakan Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Defenisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada diwilayah kerjanya,²⁷ menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Anggota Satuan Polisi

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

²⁷ Muh.hasrul, Heksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah, *Jurnal amanna gappa*, vol.25, No.2, 2017, hlm. 62.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40.

Pamong Praja merupakan aparat Pemerintah Daerah dan termasuk bagian dari pegawai negeri sipil dan memiliki tugas serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis yang mencerminkan keadaan pemerintah daerah dan warga masyarakat daerah tersebut.

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam sejarahnya satuan polisi pamong praja bukan merupakan barang baru yang dibentuk semata mata untuk membantu proses dari otonomi daerah, bahkan didalam sejarah Satpol PP telah ada sejak zaman VOC dalam masa pemerintahan Gubernur Jendral Pieter Both di Batavia. Saat Indonesia merdeka tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi organisasi Kepolisian untuk mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.²⁸

Polisi Pamong Praja telah mengalami pergantian nama dari masa ke masa namun tugas dan fungsinya tetap sama, berikut adalah sejarah pergantian nama dari Polisi Pamong Praja:

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 November 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan KapanPwon dan pada tanggal 10 November 1948 namanya diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Pada tanggal 3 Maret 1950 Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja

berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21.

3. Menurut Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Nama Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963.
5. Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah, setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
6. Polisi Pamong Praja diubah namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
7. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membantu menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
8. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁹

3. Kedudukan dan status Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam organisasi dan tata kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang "Satuan Polisi Pamong Praja".

²⁹ Muh.Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum peraturan daerah", Jurnal Amanna Gappa, Vol.25 No,2, 2017, hlm.62-63.

menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan sebagai perangkat dekonsentrasi dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.³⁰

Dalam melaksanakan tugas yang telah disebutkan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja menurut memiliki fungsi diantaranya adalah:³¹

1. Penyusunan program Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

1. Defenisi Pemerintah Daerah

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.³²

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu. untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis

yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³³

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi) karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³⁴

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³⁵

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³⁶

³⁰ Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen dalam Negeri, Pembinaan Polisi Pamong Praja, Departemen dalam Negeri, Jakarta, 2009, hlm.25.

³¹ Ismail Nurdin, "Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung", Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 16, No. 3, 2014.

³² Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 28.

³³ Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta, 2010 hlm. 11.

³⁴ Sf. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

³⁵ Kamal hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 35.

³⁶ Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm.

3. Dasar Hukum Pemerintah Daerah

- (1) Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari. Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas izin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff.³⁷

Sebagai bagian dari ekonomi rakyat jelata (lumpen proletariat economical system), daya serap sektor informal yang involutif bukan saja terbukti mampu menjadi sektor penyangga (buffer zone) yang sangat lentur dan terbuka, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah dan bahkan menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial.³⁸

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut.³⁹

a. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (depriving public space).

b. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.

Adapun Pengertian pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri-ciri secara umum yang dikemukakan oleh kartono, dkk, sebagai berikut:

a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen

b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).

c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.⁴⁰

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah Kecamatan Tembilahan

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuantan Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan. Berawal dari keinginan untuk memisahkan dirimaka melalui

26.

³⁷ Evers Hd dan Rudiger Korff, *Urbanisasi di Asia Tenggara & Makna dan Kekuasaan dalam Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23.

³⁸ Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal Sejarah, Teori Dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 42.

³⁹ Suyatno, *Bagong dan Kanarji, Kemiskinan Dan*

Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm.47.

⁴⁰ Kartono, *Pedagang Kaki Lima*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1980, hlm. 3-7.

kesepakatan bersama, masyarakat Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.⁴¹

2. Geografis Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :⁴²

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu. Mewujudkan kepastian hukum, hak asasi manusia dan kerjasama daerah.

3. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun visi dari instansinya adalah, mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram dan ketertiban umum yang lebih kondusif di Kabupaten Indragiri hilir sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang berbasis pertanian dan sumber daya pertaman, didukung oleh sumber daya manusia yang mandiri, agamis, sejahtera dan lahir bathin.

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun misi Satuan Polisi Pamong

Praja adalah:

1. Penegakan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.⁴³

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tembilahan)

Pedagang kaki lima ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ledakan penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi yang rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan mereka menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Maka aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sudah barang tentu melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Pasal 14 yang berbunyi:⁴⁴

⁴³ Agung Setia Budi, "Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah", Skripsi, program s1 jurusan hukum tata negara (siyasah) fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 27.

⁴⁴ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

⁴¹<https://repository.uinsuska.ac.id/4005/5/bab%20iv.pdf>, diakses, tanggal, 1 Agustus 2023.

⁴² Ibid.

1) Setiap orang dilarang berjualan di jalan, jembatan, trotoar, turap, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya.

2) Bupati dapat menetapkan bagian jalan dan tempat umum lainnya dan tempat usaha dan/atau pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.

3) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud ayat (2) harus tanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barang dagangannya akan dilakukan penertiban.

5) Bagian jalan dan tempat kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

B.Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Impelementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan

Faktor pendukung berpengaruh positif terhadap peran dan orientasi pemerintah daerah. Artinya, faktor pendukung disini dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan dalam melakukan penertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari Bapak Januardi selaku kasi pamwal & kerjasama menyatakan bahwa, faktor pendukung dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sudah mempunyai dua kegiatan rutin yang dilaksanakan yang bentuknya itu patrol wilayah. Pertama Satgas Trantibumas yang fokus kepada pedagang kaki lima dimana mengawasi sedari kecamatan tembilahan sampai tembilahan hulu tentang pelanggaran-pelanggran pedagang kaki lima. Kedua Unit Reaksi Cepat (URS) sebagai bekap

yang punya tugas aktif piket selama sekitar 18 jam untuk mengawal perda 11 tahun 2016. Kemudian juga berkolaborasi antara satgas trantibumas dan Unit reaksi cepat sama-sama melakukan patrol skala besar setiap harinya pagi siang sore dan malam apabila ada pedagang-pedagang yang yang tidak menaati aturan tetap dilakukan himbauan humanis yang paling utama.⁴⁵

Dan faktor penghambat tentunya menjadi pengaruh negatif ada beberapa yang Pertama sarana & prasarana yang sedikit menjadi penghambat contoh mobil patrol yang hanya 2 unit. Kedua kurangnya penyidik pada surat peringatan ini sebelum dilakukan penertiban yang punya kewenangan untuk memberikan surat peringatan penyidikan dan penyelidikan itu kewenangan nya adalah penyidik tidak bisa dilakukan oleh satpol pp biasa.

C.Upaya yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tembilahan

Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: Pertama berkoordinasi dengan melakukan himbauan, kedua melakukan pendekatan-pendekatan humanis melalui OPD nya pihak kelurahan dan pihak kecamatan nya dan pendekatan kepada para pedagang nya untuk mengikuti perda dikabupaten Indragiri Hilir.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada penjelasan sebelumnya bahwa keterbatasan sarana prasarana menjadi salah satu hal yang menyebabkan tidak maksimalnya satuan polisi pamong praja dalam

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Januardi Saputro, Kasi Pamwal & Kerjasama Kabupaten Indragiri Hilir , hari rabu 19 juli 2023, bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja.

dalam melakukan proses penertiban. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Januardi Saputro sebagai Kasi Pamwal & Kerjasama Kabupaten Indragiri Hilir.⁴⁶

Akan hal tersebut, penulis menilai sangat tepat jika menggunakan teori pengawasan dan teori penegakan hukum pada fenomena yang terjadi saat ini. Konsep teori disini dapat dikatakan sebagai acuan terkait dalam meningkatkan potensi perubahan pada birokrasi. Oleh sebab itu, dengan di aplikasinya ketentuan pada teori ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, salah satunya yaitu dengan melakukan penambahan terhadap sarana dan prasarana, agar proses penertiban pedagang kaki lima berjalan dengan baik dan proses penyampaian produk hukum nya berjalan dengan baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Tembilahan sudah dijalankan, tetapi belum signifikan karena masih adanya pedagang kaki lima yang belum menaati mengenai Peraturan Daerah yang di Kota Indragiri Hilir. Penertiban pedagang kaki lima dianggap penting agar bisa mewujudkan suatu tempat atau lokasi berdagang yang nyaman, rapi, sehat dan juga bisa terhindar dari kemacetan lalu lintas sehingga dalam konsep penataan pedagang kaki lima pemerintah melakukan pendataan terlebih dahulu. Setelah di data kemudian pemerintah menyediakan lokasi tempat berjualan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Impelementasi Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat (Penertiban Pedagang Kaki Lima Di

Kecamatan Tembilahan) selain itu ada beberapa himbauan atau tindakan untuk menuju penertiban langsung. maka disini satuan polisi pamong praja menjalankan secara optimal penertiban pedagang kaki lima yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.

2. Faktor pendukung dalam proses penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat yaitu dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sudah mempunyai dua kegiatan rutin yang dilaksanakan yang bentuknya itu patrol wilayah. Pertama Satgas Trantibumas yang fokus kepada pedagang kaki lima dimana mengawasi sedari kecamatan tembilahan sampai tembilahan hulu tentang pelanggaran-pelanggran pedagang kaki lima. Kedua Unit Reaksi Cepat (URS) sebagai bekap yang punya tugas aktif piket selama sekitar 18 jam untuk mengawal perda 11 tahun 2016. Kemudian juga berkolaborasi antara satgas trantibumas dan Unit reaksi cepat sama-sama melakukan patrol skala besar setiap harinya pagi siang sore dan malam apabila ada pedagang-pedagang yang yang tidak menaati aturan tetap dilakukan himbauan humanis yang paling utama. Kemudian Faktor penghambat pertama sarana & prasarana yang sedikit menjadi penghambat contoh mobil patrol yang hanya 2 unit. Kedua kurangnya penyidik pada surat peringatan ini sebelum dilakukan penertiban yang punya kewenangan untuk memberikan surat peringatan penyidikan dan penyelidikan itu kewenagannya adalah penyidik tidak bisa dilakukan oleh satpol pp biasa dan ketiga masih belum terlaksana dengan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Januardi Saputro, Kasi Pamwal & Kerjasama Kabupaten Indragiri Hilir, hari rabu 19 juli 2023, bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja

baik dikarenakan personil yang terbatas untuk penertiban pedagang kaki lima.

3. Upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terkait penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Pertama berkoordinasi dengan melakukan himbauan, Kedua melakukan pendekatan-pendekatan humanis melalui OPD nya pihak kelurahan dan pihak kecamatan nya dan pendekatan kepada para pedagang nya untuk mengikuti perda dikabupaten Indragiri Hilir.

B. Saran

1. Pedagang kaki lima salah satu permasalahan yang sering terjadi dikalangan kota termasuk di Kecamatan Tembilahan. Adapun kurangnya personil satuan polisi pamong praja sekiranya apat membimbing para pedagang kaki lima dengan sebaik mungkin agar dapat bekerja secara lebih maksimal dan efektif sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir.
2. Mengenai faktor pendukung yaitu tentunya satuan polisi pamong praja harus tetap mempertahankan kegiatan rutin yaitu patrol rutin dimana yaitu satgas trantibumas dan unit reaksi cepat (URS) dan untuk faktor penghambat yang dijumpai tentunya sarana dan prasarana yang kurang memadai agar melakukan penambahan dan anggaran serta penambahan kapasitas dalam proses penertiban .
3. Mengenai upaya yang telah dipaparkan sebelumnya sangat diperlukan keseriusan dari satuan polisi pamong praja agar melaksanakan hal tersebut sebaik mungkin. Tujuannya agar proses penertiban pedagang kaki lima berjalan dengan lancar sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Achsan, 2008, Model Tranformasi Sosial Sektor Informal Sejarah,Teori

Dan Praksis Pedagang Kaki Lima, In-Trans Publishing, Malang.

Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Evers Hd dan Rudiger Korff, 2002, Urbanisasi di Asia tenggara & Makna dan Kekuasaan dalam Ruang Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta..

Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung.

Gaspar Liauw, 2015, "Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL", Refika Aditama, Bandung.

Hani Handoko, 1999, "Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia", Rafika Aditam, Jakarta.

Inu Kencana Syafiie, 2010, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2013, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.

Jur Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamal hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar.

Kartono, 198-, Pedagang Kaki Lima, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

M. Manullang, 1997, "Dasar-dasar Management", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maragin Masry Simbolon, 2004, "Dasar-dasar Adminstrasi dan Manajemen", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mulyadi, 2015, Implementasi Kebijakan, Balai Pustaka, Jakarta,

Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Sarwoto, 1991, "Dasar-dasar

- Organisasi dan Management”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sf. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Suyatno, 2005, Bagong dan Kanarji, Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin, Airlangga University Press, Surabaya.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat”, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Agung Setia Budi, “Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”, Skripsi, program s1 jurusan hukum tata negara (siyasah) fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 27.
- Gusti Pratama Putra “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 2.
- Ifan Wardani Harsan, “Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima”, Ejournal Ilmu Pemerintahan, vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 146.
- Ismail Nurdin, “Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung”, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 16, No. 3, 2014.
- Muh.Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum peraturan daerah”, Jurnal Amanna Gappa, Vol.25 No,2, 2017, hlm.62-63.
- Muh.hasrul, Heksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah, Jurnal amanna gappa, vol.25 No.2, 2017, hlm. 62
- Nurrafiqah Sari, “Kontribusi Perempuan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 35.
- Riska Saiful, “Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Bupati Kabupaten Enrekang”, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 10.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang “Satuan Polisi Pamong Praja”.
- Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen dalam Negeri, Pembinaan Polisi Pamong Praja, Departemen dalam Negeri, Jakarta, 2009, hlm.25

D. Website

- <https://www.goriau.com/berita/baca/terbitkan-pkl-mangkal-satpol-pp>, diakses, tanggal, 25 februari 2023
- <https://riaulink.com/news/detail/17883/ganggu-pejalan-kaki-satpol-pp>

tertibkan-pkl-di wilayah-tembilahan,
diakses, tanggal, 25 februari 2023
<https://repository.uir.ac.id/3666/4/bab1.pdf>,
diakses, tanggal, 25 februari 2023.
<https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/6616/3/BAB%20II.Pdf>,
diakses,
tanggal, 8 Agustus 2023
[https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Tren
Penindakan-Kasus-Korupsi-Tahun-
2020](https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Tren-Penindakan-Kasus-Korupsi-Tahun-2020), diakses, tanggal, 8 Agustus
2023.
[http://satpolpp.inhilkab.go.id/wpcontent/upl
oads/2021/03/PERDA-11-TAHUN
2016.pdf](http://satpolpp.inhilkab.go.id/wpcontent/uploads/2021/03/PERDA-11-TAHUN-2016.pdf), diakses, tanggal, 8 Agustus
2023
[http://ejournal.uajy.ac.id/698/2/1HK08919.
pdf](http://ejournal.uajy.ac.id/698/2/1HK08919.pdf), diakses, tanggal, 8 Agustus 2023.
[https://riaulink.com/news/detail/18158/bupa
ti-inhil-intruksikan-satpolpp-tegakan-
perda-no-11-tahun-2016-tentang-
ketertiban-umum](https://riaulink.com/news/detail/18158/bupati-inhil-intruksikan-satpolpp-tegakan-perda-no-11-tahun-2016-tentang-ketertiban-umum), diakses, tanggal,
25 januari 2023
[https://id.wikipedia.org/wiki/tembilahan,_in
dragiri_hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/tembilahan,_in_dragiri_hilir) diakses, tanggal, 26
januari 2023
[https://repository.uinsuska.ac.id/4005/5/bab
%20iv.pdf](https://repository.uinsuska.ac.id/4005/5/bab%20iv.pdf), diakses, tanggal, 1
Agustus 2023.